

Pengurangan Risiko Bencana Bidang Mitigasi dan Agenda Pembangunan Nasional

F. Rahmawati, S.Syaukat, NS.Rahatiningtyas, Y.Nurraini
Pusat Penelitian Geografi Terapan (PPGT)
FMIPA Universitas Indoensia

PERMASALAHAN

Kegiatan pengurangan risiko bencana bidang mitigasi di Indonesia dilakukan oleh lebih dari 30 K/L. Kurangnya sinkronisasi, koordinasi, dan pengawasan menyebabkan kegiatan pengurangan risiko bencana bidang mitigasi menjadi tidak efisien dan efektif. Bagaimana proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengawasan dilakukan dan siapa yang bertugas melakukan hal tersebut merupakan pertanyaan besar yang perlu dijawab. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengawasan yang dilakukan instansi terkait kegiatan pengurangan risiko bencana di Indonesia.

METODE

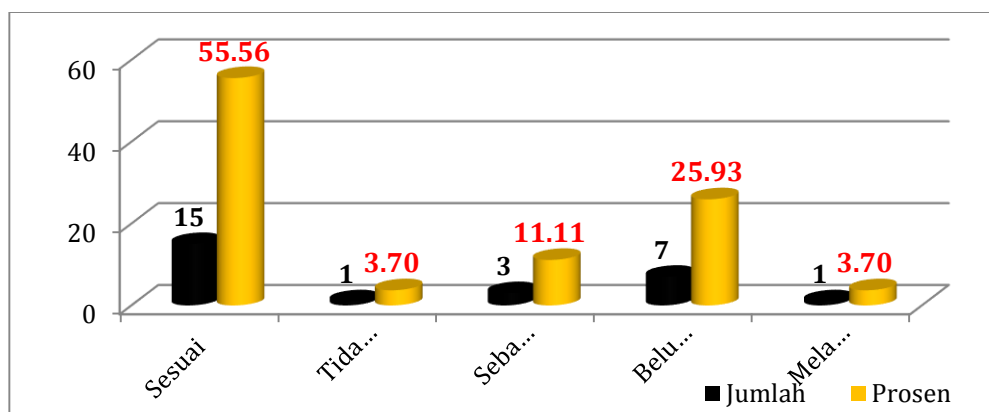
Dalam kajian ini, lingkup pembahasan pengurangan risiko bencana bidang mitigasi ini difokuskan pada kejadian yang terkait kebakaran hutan dan lahan dan tanah longsor.

Adapun metode yang dilakukan dalam kajian ini adalah *desk study*, *Focus Group Discussion* (FGD), dan rapat koordinasi tingkat pusat. FGD dan rapat koordinasi tingkat pusat dihadiri oleh Pusat Riset dan Respon Bencana Universitas Indonesia, Departemen Geografi FMIPA Universitas Indonesia, Pusat Kajian Antropologi Universitas Indonesia, Kemenko PMK, Badan SAR Nasional, BNPB, BPBD DKI Jakarta, BPBD Kabupaten Bogor, BPBD Jawa Barat, Kemen PUPR, KemenLH, Kementerian Kesehatan RI, Kemensos, BPPT, BIG, dan BMKG.

HASIL KAJIAN

Berdasarkan hasil telaah dan evaluasi, diperoleh simpulan, diantaranya :

- Penilaian kinerja berdasarkan sisi kesesuaian peran K/L dalam implementasi kebijakan dan strategi penanggulangan bencana nasional terungkap bahwa, 15 K/L (55,56%) sudah sesuai; 1 K/L (3,70%) tidak sesuai; 3 K/L (11,11%) sebagian yang sudah sesuai; 7 K/L (25,93) belum melaksanakan peran yang diharapkan; 1 K/L (3,70%) sudah melaksanakan meskipun belum diatur perannya. Detail bagan dapat dilihat di bawah ini.

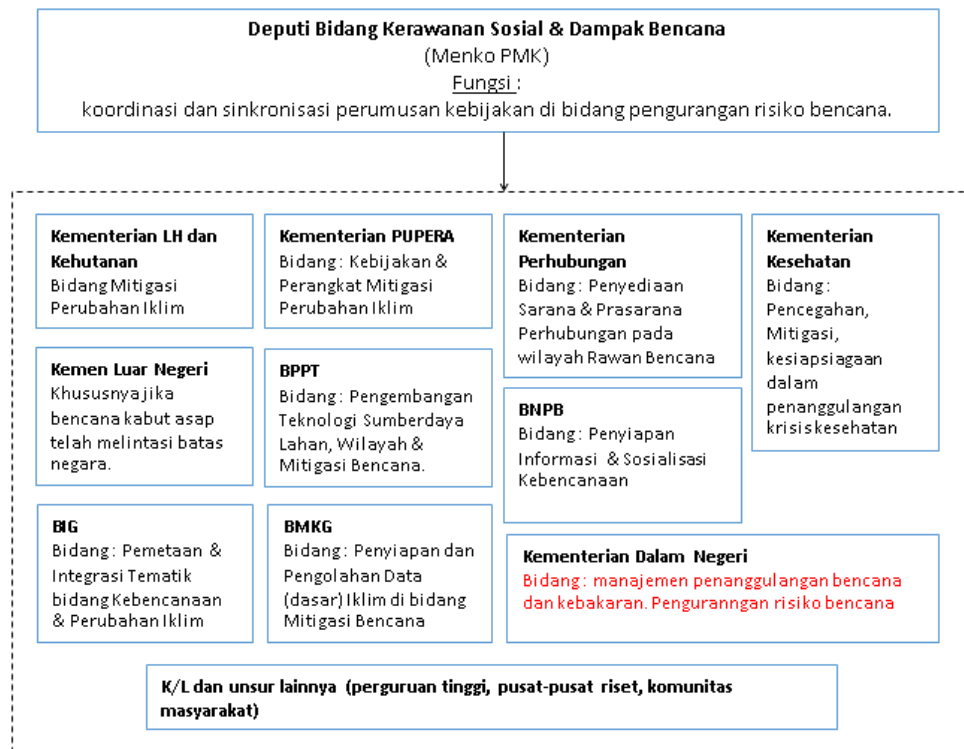


Gambar 1. Kesesuaian Peran dalam Implementasi Kebijakan & Strategi Penanggulangan Bencana dengan Program/Kegiatan di K/L

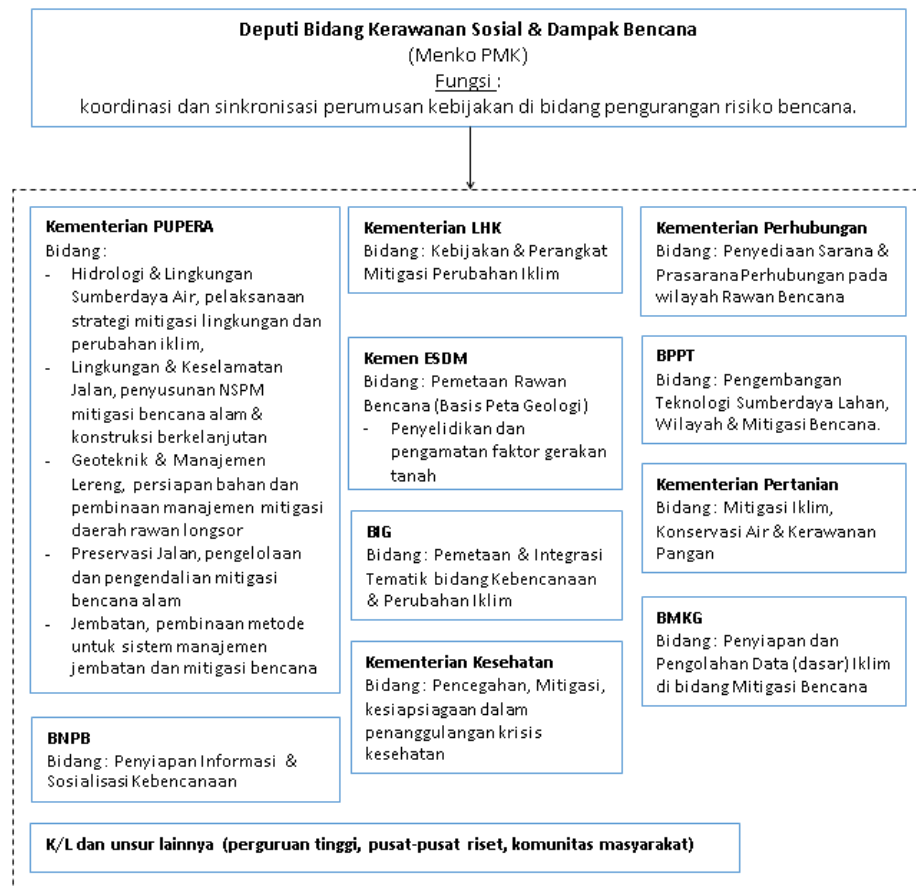
- Unit kerja penanggulangan bencana hanya dimiliki oleh 5 K/L dari total 28 K/L yang dievaluasi.
- Proporsi alokasi anggaran penanggulangan bencana berdasarkan kategori penanganan bencana diketahui sebagai berikut; 77,43 % pada pra bencana; 19,87 % pada tanggap darurat, dan 2,72 % pada pasca bencana.

Dalam rangka mensinkronkan program PB dan PRB, maka diperlukan payung hukum yang kuat dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang pengelolaan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan PB dan PRB.

Berdasarkan jabaran tugas dan fungsi K/L dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, maka alur koordinasi yang tergambar dalam proses tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut.



Gambar 2. Alur Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana Bidang Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan



Gambar 3. Alur Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana Bidang Mitigasi Bencana Tanah Longsor

KESIMPULAN

Berdasarkan urian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan, diperhatikan, dan dilakukan bersama-sama oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam mitigasi bencana, antara lain:

1. Kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan kebencanaan atau mendukung usaha preventif kebencanaan seperti kebijakan tataguna tanah agar tidak membangun di lokasi yang rawan bencana;
2. Kelembagaan pemerintah yang menangani kebencanaan, yang kegiatannya mulai dari identifikasi daerah rawan bencana, penghitungan perkiraan dampak yang ditimbulkan oleh bencana, perencanaan penanggulangan bencana, hingga penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif kebencanaan;
3. Identifikasi lembaga-lembaga yang muncul dari inisiatif masyarakat yang sifatnya menangani kebencanaan, agar dapat terwujud koordinasi kerja yang baik;
4. Pelaksanaan program atau tindakan ril dari pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang ada, yang bersifat preventif kebencanaan;
5. Meningkatkan pengetahuan pada masyarakat tentang ciri-ciri alam setempat yang memberikan indikasi akan adanya ancaman bencana.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2007. Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia Edisi II. Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana. Jakarta.

Anonim. 2015. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2010. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014. Jakarta.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2010. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010-2014. Jakarta.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2015. Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030.

Qodriyatun, Nurhayati. 2014. Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Info Singkat Kesejahteraan Sosial, Vol VI No.06/II/P3DI/Maret/2014.